



DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN
KABUPATEN BONE



LAPORAN KINERJA TAHUN 2023



LAPORAN KINERJA 2023

DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Disusun dan diterbitkan oleh Tim Penyusun LKjIP
Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian ©2024

TIM PENYUSUN



Penyusun mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada seluruh Aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kab. Bone, Inspektorat Daerah Kabupaten Bone, Bagian Organisasi Setda Kab. Bone, Bappeda Kab. Bone, BKAD Kab. Bone, dan seluruh pihak yang telah mendukung, menyumbangkan tenaga, pikiran, kreativitas, dan keahliannya dalam proses penyusunan Laporan Kinerja ini.

Pembina/Pengarah:
H. BARHAM, S.T., M.M.
Kepala Dinas

Ketua:
Andi Muslim, S.Sos., M.Si
Sekretaris Dinas

Sekretaris (Penulis Utama):
Suriani, S.Sos
Kasubag Program

Anggota:
Penyeda Data:
Rafiqqa, S.E., M.M.
Marlinda, S.E., M.M.
Ahmad Husain M, S.Sos., M.Ikom
Ichsan Ashari, S.Sos
Windha Novitha Muallim A., S.Kom.
Aksa, S.Hut., M.Si
Muhammad Iqbal, SKM
Fadly, S.E.
Nurliana, S.S.
Ajeman, S.E
Rohani
Darmawan Ramli, S.E., M.Si
Kontributor:
Nirwana, S.Sos
Erwin, S.H.
Awal Rahmat Amal
A. Saddang Rahmat H.

Desain Grafis:
Suriani, S.Sos

Desain Grafik:
Ichsan Ashari, S.Sos

Dokumen digital SK Tim
Penyusun LKjIP ini dapat
diakses dengan memindai QR
code di samping



KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,
Salam Sejahtera.

Segala puji kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena telah memberikan rahmat dan karunia- Nya sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 dapat diselesaikan tepat waktu. Laporan Kinerja ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang telah dilakukan melalui pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Tahun 2023.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menyajikan hasil capaian kinerja Dinas Kominfo tahun 2023 berdasarkan realisasi dan capaian target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bone Tahun 2023. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi atas kinerja Dinas Kominfo Kabupaten Bone yang terukur kepada Pimpinan khususnya Bupati Bone atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai serta sebagai upaya perbaikan untuk meningkatkan kinerja Dinas Kominfo pada masa yang akan datang. Apresiasi diberikan atas kerja seluruh aparat Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone selama tahun 2023.



SEKILAS TENTANG LKJIP

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), Akuntabilitas Kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/ kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui alat pertanggungjawaban secara periodik yang disebut dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

LKjIP adalah wujud pertanggungjawaban pejabat publik kepada masyarakat tentang kinerja lembaga pemerintah selama setahun anggaran. Secara lengkap memuat laporan yang membandingkan perencanaan dan hasil. Hal yang paling utama untuk diinformasikan dalam LKjIP adalah yang mencakup capaian kinerja tahun berjalan yang merupakan perbandingan antara realisasi dengan rencana tahun sebelumnya.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone mengemban tanggung jawab untuk menjadikan Kabupaten Bone terkoneksi melalui digitalisasi agar semakin maju. Hal itu dapat dilakukan dengan menyediakan infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Dinas Kominfo menargetkan Kabupaten Bone terkoneksi jaringan dengan membangun infrastruktur telekomunikasi merata di seluruh Organisasi Perangkat Daerah sampai dengan Tahun 2024. Saat ini kehidupan kemasyarakatan, sosial dan ekonomi sangat bergantung pada tersedianya infrastruktur telekomunikasi dan informatika. Saat ini kita berada di masa kebangkitan dari pandemi yang telah berlangsung selama kurang lebih 4 tahun. Meskipun pandemi telah berangsur pulih, namun kita harus tetap waspada untuk mencegah penularan virus covid-19. Dinas Kominfo merupakan unsur yang sangat berperan dalam mewujudkan Program Presiden untuk meningkatkan internet-link ratio di Indonesia, untuk memperkecil digital divide, sebagai salah satu agenda utama Kementerian Kominfo. Hal ini menjadi tugas besar bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai salah satu jajaran Kementerian Kominfo untuk mempercepat target Indonesia terkoneksi selama pandemi.

Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone ini disusun sebagai media untuk menyampaikan laporan akuntabilitas kinerja Dinas Kominfo dan diharapkan juga dapat menjadi sumber informasi bagi semua pemangku kepentingan dan masyarakat umum. Segala pencapaian dan kekurangan dalam hal kinerja yang terangkum dalam laporan ini akan menjadi bahan evaluasi bagi seluruh jajaran di lingkungan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

Pada akhirnya terima kasih yang tak terhingga untuk seluruh jajaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone atas kerjasamanya dan apresiasinya dalam pencapaian atas seluruh target kinerja yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada tahun 2023.

Watampone, 22 Januari 2024
Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone,

H. BARHAM, S.T., M.M.
Pembina (IV/a)
NIP. 197407132009011003



PENDAHULUAN

01

- 2 UMUM
- 4 ORGANISASI
- 8 ISU STRATEGIS
- 10 ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

PERENCANAAN KINERJA

- 12 TUJUAN DAN SASARAN
- 14 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- 16 INDIKATOR KINERJA UTAMA
- 17 PERJANJIAN KINERJA
- 18 STANDAR PENILAIAN

02





AKUNTABILITAS KINERJA

03

20 CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

38 REALISASI ANGGARAN

PENUTUP

04

40 SIMPULAN UMUM

40 KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018-2023	13
Tabel 2.2 Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan Renstra Perubahan 2018-2023	15
Tabel 2.3 Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2023	16
Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023	17
Tabel 3.1 Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023	20
Tabel 3.2 Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020	21
Tabel 3.3 Realisasi Kinerja Tahun 2021-2022	21
Tabel 3.4 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023	22
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Standar Pelayanan Minimal/Target Nasional Lainnya	23
Tabel 3.6 Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja	23
Tabel 3.7 Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	27
Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja	28
Tabel 3.9 Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023	38



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	4
Gambar 2 Grafik Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Tingkat Pendidikan	6
Gambar 3 Grafik Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Pangkat dan Golongan	7
Gambar 4 Grafik Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Berdasarkan Eselon	7
Gambar 5 Grafik Klasifikasi Tenaga Non ASN/Kontrak Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	7



01

PENDAHULUAN

UMUM

ORGANISASI

ISU STRATEGIS

ASPEK STRATEGIS
ORGANISASI



Dinas Kominfo senantiasa berada di barisan depan dalam memenuhi kebutuhan Pemerintah akan jaringan di masa pandemi. Di setiap unsur terjadi perubahan sistem, Kominfo hadir menjadi solusi untuk menjawab perubahan itu. Tim yang senantiasa siap dalam melayani dan memenuhi kebutuhan OPD dan Masyarakat akan informasi

A. UMUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone merupakan bentuk pertanggungjawaban atas perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian yang memuat tujuan/sasaran strategis, indikator dan target kinerja dari sasaran strategis. Oleh karena itu Laporan Kinerja sangat penting guna mengukur tingkat keberhasilan Dinas Kominfo dalam melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan guna mendukung pencapaian tujuan dan sasaran yang termuat dalam perjanjian kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Perubahan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone memiliki peran strategis dalam pembangunan bidang Komunikasi Informatika, menyediakan infrastruktur TIK, pengelolaan data dan statistik secara sektoral, keamanan informasi dan persandian serta menyebarluaskan informasi di Kabupaten Bone melalui berbagai media. Pelaksanaan ketiga



Bidang urusan yakni Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian tersebut dilandaskan pada Penyelenggaraan Pemerintahan yang baik (good governance) yang memiliki 3 (tiga) landasan utama yaitu transparansi, akuntabilitas dan partisipatif. Transparansi dalam hal ini merupakan suatu keterbukaan dalam hal perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban atas pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Akuntabilitas sendiri merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau unit organisasi untuk

mempertanggungjawabkan pengelolaan sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan partisipatif diartikan sebagai keikutsertaan setiap individu yang terdapat dalam organisasi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis organisasi.

Laporan Kinerja ini disusun dengan mengacu pada 3 (tiga) ketentuan Peraturan Perundang-undangan yaitu:

- 1.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
- 2.Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- 3.Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Pemerintah.

Selain mengacu pada ketentuan di atas, penyusunan LKjIP ini berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 serta dokumen perencanaan turunannya.

Penyusunan Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian mempunyai maksud dan tujuan sebagai berikut:

- 1.Memberikan informasi kinerja yang terukur serta mewujudkan akuntabilitas Instansi Pemerintah kepada pihak pemberi mandat/amanat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
- 2.Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian selama tahun 2023 dalam rangka melaksanakan Visi dan Misi yang tertuang dalam RPJMD Perubahan Kabupaten Bone Tahun 2018-2023;
- 3.Sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan bagi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian untuk meningkatkan kinerjanya. Hasil evaluasi yang dilakukan akan digunakan sebagai dasar penyusunan beberapa rekomendasi untuk menjadi masukan dalam menetapkan kebijakan dan strategi yang akan datang sehingga dapat meningkatkan kinerja Unit Kerja pada tahun-tahun mendatang.

B. ORGANISASI

Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, struktur organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dapat dilihat pada bagan berikut:

Gambar 1
Struktur Organisasi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian



Sumber: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Januari 2024

Tugas dan Fungsi

Dinas Komunikasi, Informasi dan Persandian Kabupaten Bone yang dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 31 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone. Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 81 Tahun 2021 susunan Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terdiri dari:

- Kepala Dinas yang mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah;
- Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas koordinasi di bidang kesekretariatan yang menjadi tanggungjawab kedinasan yang terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian serta Sub Bagian Keuangan;
- Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik;
- Bidang Komunikasi Publik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan, dan melaksanakan kebijakan teknis bidang komunikasi publik;
- Bidang Teknologi Informatika dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang teknologi informatika;
- Bidang Persandian dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang persandian; dan
- Bidang Statistik dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam mengoordinasikan, merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis bidang statistik.



Scan QR Code untuk
melihat dokumen
Peraturan Bupati Bone
Nomor 31 Tahun 2023

Keadaan Pegawai

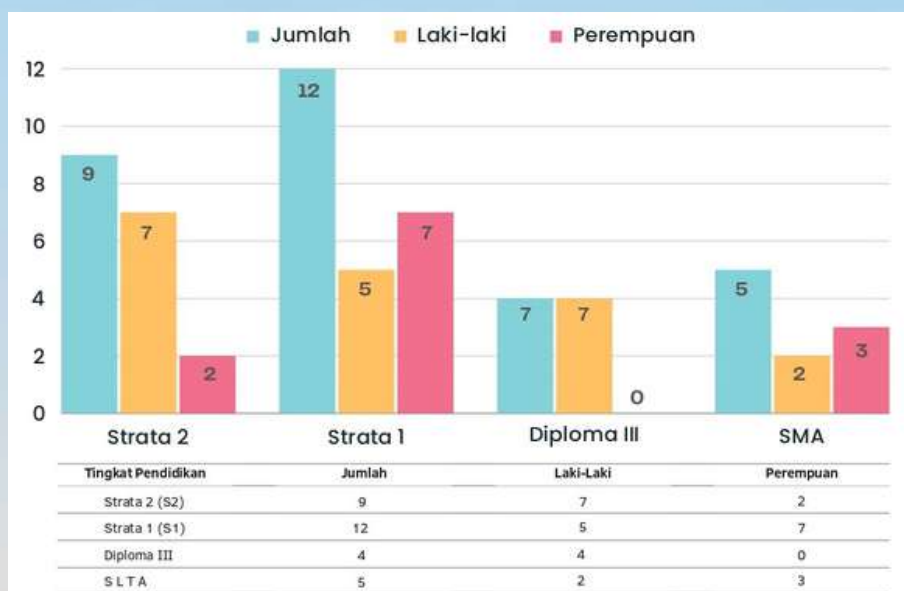
Efektifitas dan Efisiensi pelaksanaan Tugas dan Fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, disamping ditentukan oleh kemantapan sistem, mekanisme, tata cara pelaksanaan, dan pengelolaan Teknologi Informasi, Komunikasi, Statistik dan Persandian, juga sangat ditentukan oleh Sumber Daya Aparatur yang secara signifikan akan menentukan kinerja yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone.

JUMLAH TOTAL PEGAWAI

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone per 31 Desember 2023 adalah 63 pegawai yang terdiri dari 31 pegawai ASN dan 32 pegawai Non ASN. Seluruh pegawai tersebut tersebar ke Sekretariat Dinas dan 5 Bidang Teknis. yang mengampu 3 (tiga) urusan pemerintahan yakni komunikasi informatika, statistik, dan persandian. Keadaan pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terbagi ke dalam beberapa aspek.

Dari jumlah total pegawai pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone, sebenarnya keadaan ini sangat tidak proporsional. Hal ini terjadi karena jumlah sebaran ASN yang tidak memadai di setiap unit kerja. Ada beberapa unit kerja yang tidak memiliki staf ASN, diantaranya Sub Bagian Program dan Sub Bagian Keuangan Sekretariat Dinas, sementara 4 Bidang hanya memiliki masing-masing 1 orang staf. Hanya Bidang Persandian yang memiliki 6 orang staf.

Gambar 2
Grafik Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Tingkat Pendidikan

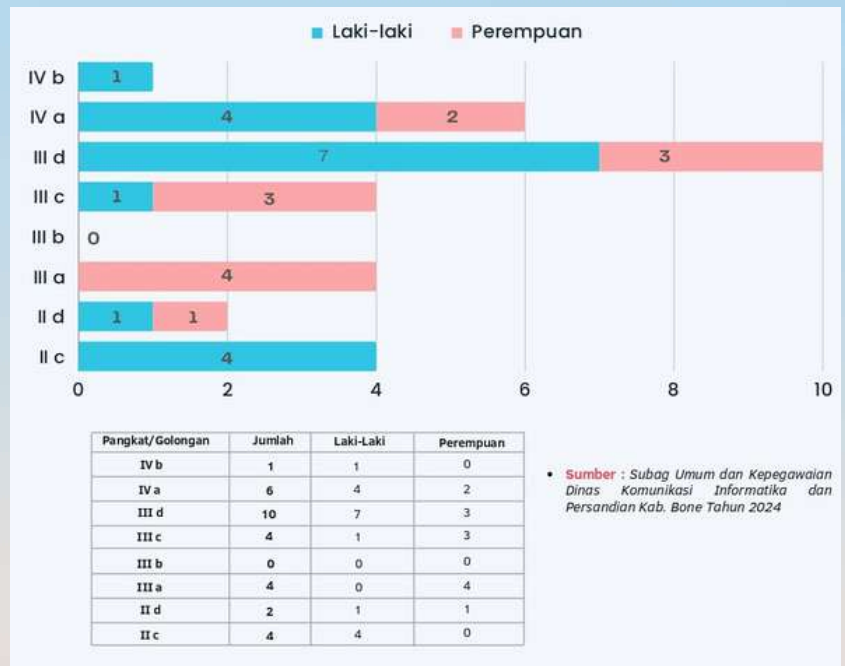


Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2024

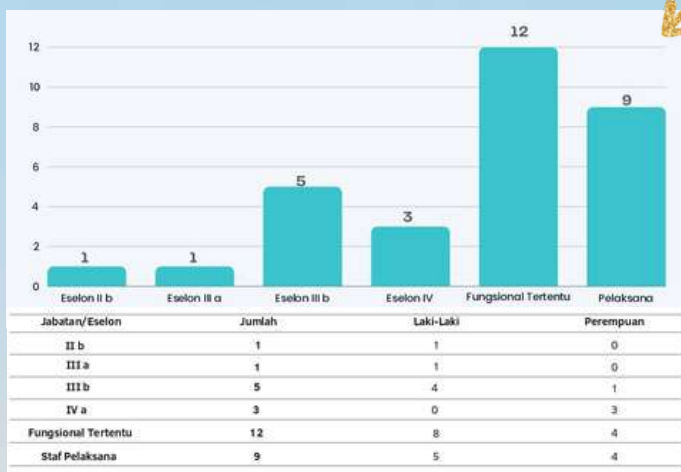
Berdasarkan Tingkat Pendidikan, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone didukung oleh 31 (Tiga puluh satu) orang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terdiri atas 10 orang Pascasarjana (S2), 13 orang berpendidikan Sarjana (S1), 4 orang Diploma III (DIII), dan 4 orang Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA).

Gambar 3
Grafik Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Pangkat dan Golongan

Berdasarkan pangkat dan golongan, ASN yang tergabung pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian terdiri atas 7 orang Golongan IV (1 orang Golongan IV/b dan 6 orang Golongan IV/a), 18 orang Golongan III (10 orang Golongan III/d, 4 orang Golongan III/c, dan 4 orang Golongan III/a), dan 6 orang Golongan II (2 orang Golongan II/d dan 4 orang Golongan II/c).



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2024



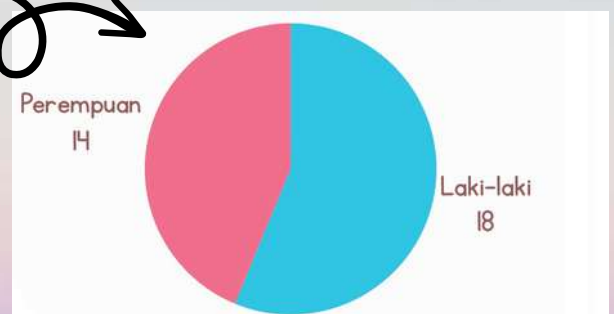
Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2024

Gambar 4
Grafik Klasifikasi ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian berdasarkan Eselon

Berdasarkan tingkat Jabatan/ Eselon Aparatur Sipil Negara (ASN) yang tergabung dalam Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri atas 1 orang eselon II.b, 1 Orang Eselon III.a, 5 Orang Eselon III.b, 3 Orang Eselon IV.a, 12 Orang Fungsional tertentu 9 Orang Staf Pelaksana.

Gambar 5
Grafik Klasifikasi Non ASN Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Selain Aparatur Sipil Negara (ASN) terdapat 32 (Tiga puluh dua) orang Tenaga Non ASN atau Tenaga Kontrak yang dipekerjakan untuk melaksanakan tugas-tugas administrasi dan fungsional umum lainnya



Sumber: Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Januari 2024

C. ISU STRATEGIS

Dalam menjalankan Tugas Pokok dan Fungsinya, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone perlu berkoordinasi dan membangun kerjasama yang sinergis dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah yang bertujuan mengidentifikasi isu strategis serta faktor-faktor yang mempengaruhi isu yang ada pada setiap bidang berdasarkan tugas dan fungsinya. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kab. Bone membidangi 3 (Urusan) Bidang Urusan Wajib non Pelayanan Dasar yaitu Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian yang diampu oleh 5 (lima) Bidang yaitu Bidang Komunikasi Publik, Bidang Hubungan Masyarakat dan Informasi Publik, Bidang Teknologi Informasi, Bidang Statistik dan Bidang Persandian.

Adapun isu-isu strategis urusan komunikasi informatika, statistik, dan persandian yaitu:

URUSAN KOMUNIKASI INFORMATIKA

- Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone terbentuk pada tanggal 1 Januari 2017 berdasarkan Peraturan Bupati Bone Nomor 76 Tahun 2016. Ini menunjukkan bahwa Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten masih tergolong baru. Hal tersebut menyebabkan masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung khususnya fasilitas teknologi informatika dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Sejak WHO (World Health Organization atau Badan Kesehatan Dunia) mendeklarasikan Corona Virus Disease-19 (Covid-19) sebagai pandemic pada tanggal 9 Maret 2020 dan di Indonesia ditemukan kasus pertama pada 2 Maret 2020. Hal ini pastinya sangat berpengaruh pada seluruh aspek kehidupan seperti Perekonomian, Pemerintahan, Sosial, Kesehatan, dan Pendidikan. Hal ini merupakan tantangan besar Bagi Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian sebagai OPD yang mengampu 3 (tiga) urusan yakni Komunikasi Informatika, Statistik, dan Persandian. Sejak covid-19 menyebar di Indonesia, maka pemerintah memberlakukan pembatasan pada seluruh aktivitas masyarakat. Pegawai dan karyawan bekerja dari rumah dan seluruh sekolah dan perguruan tinggi diharuskan untuk belajar on-line, seluruh pertemuan dan rapat dilaksanakan melalui system zoom meeting. Hal ini tentu bukan tanpa halangan, dengan adanya hal tersebut Dinas Kominfo harus berupaya keras untuk menyiapkan kapasitas bandwidth yang berkualitas serta sarana dan prasarana yang memadai untuk membackup pelaksanaan zoom meeting dan video conference;
- Dimasa pandemi seperti saat dimana selama kurang lebih 2 tahun terakhir segala aktivitas pemerintahan sangat mengandalkan teknologi informatika berbanding terbalik dengan sumber daya aparatur khususnya terkait dengan pengelola teknologi informatika yang belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Hal ini tentu membutuhkan kerja lebih bagi aparat Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian saat harus handle beberapa kegiatan baik itu zoom meeting maupun video conference pada waktu yang bersamaan;
- Dengan luas wilayah terbesar ketiga di Sulawesi Selatan, terdapat beberapa wilayah masih memiliki area yang blank spot yang belum terjangkau jaringan seluler yang tersebar di beberapa Kecamatan;
- Kondisi geografis Kabupaten Bone, merupakan kabupaten dengan wilayah otonom terluas ketiga di Sulawesi Selatan. Luas wilayah Kabupaten Bone sekitar 4.559 km² persegi, dengan jumlah penduduk 812.842 jiwa dan rata-rata tingkat kepadatan penduduk adalah 157 jiwa per km². Sebaran penduduk yang tidak merata dan jarak antar pusat pemerintahan kabupaten, kecamatan dan desa berpotensi menjadi penyebab komunikasi tidak efektif. Meski tak dapat dipungkiri bahwa modernisasi teknologi komunikasi informasi secara umum bisamenjadi solusi. Namun, di beberapawilayah yang memiliki keterbatasan infrastruktur teknologi komunikasi yang masih minim, tentunya solusi tersebut tidak berlaku lagi. Di perlukan metode publikasi yang terintegrasi dengan pendekatan komunikasi publik seperti melalui pengumuman di Radio, kelompok dan simpul-simpul sosial kemasyarakatan, atau melalui media below the line seperti spanduk, baliho, poster dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut di atas untuk pemenuhan aspek komunikasi pemerintahan yang efektif tentunya dibutuhkan supporting system yang lengkap. Mulai dari anggaran yang memadai, ketersediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia yang menguasai bidang tugas yang diemban;
- Belum memadainya infrastruktur jaringan sehingga perlu adanya Kerjasama dengan Kementerian dan Provinsi serta Mitra swasta untuk membangun BTS;
- Masih adanya beberapa Kecamatan yang tidak terjangkau layanan internet atau bandwidth yang disediakan Pemerintah sehingga Masyarakat kesulitan dalam berkomunikasi dan menerima Informasi berbasis IT.

Sumber: Website Resmi Pemerintah Kabupaten Bone
<https://bone.go.id>



URUSAN STATISTIK

- Belum adanya data yang akurat, Valid dan relevan serta up to date yang dapat mendukung terwujudnya kualitas produk perencanaan yang baik;
- Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kualifikasi pendidikan formal;
- Relatif rendahnya kualitas sumberdaya manusia manusia pengumpul, pengolah dan penyaji laporan/data dilihat dari kemampuan teknis perencanaan;
- Masih kurang sinergisnya koordinasi antar SKPD terkait dengan proses pengumpulan, pengolahan dan pemanfaatan data statistik dalam proses perencanaan.

URUSAN PERSANDIAN

- Belum adanya Peralatan dan Tenaga Pengelola Persandian yang memadai;
- Pengalokasian anggaran yang terbatas sehingga sangat sulit bagi Perangkat Daerah khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian untuk melakukan inovasi terkait dengan pengembangan Teknologi Informasi yang notabene membutuhkan dana yang cukup besar.

Isu-isu tersebut di atas berpotensi menghambat laju Pemerintahan Kabupaten Bone dalam melakukan penyebaran informasi penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan informasi publik guna mewujudkan keterbukaan informasi publik serta dapat menghambat proses reformasi birokrasi menuju penyelenggaraan pemerintahan yang efisien melalui pemanfaatan TIK. Konsekuensi logis dari hal ini yakni, akan berdampak baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone adalah bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat akan Informasi, karena memperoleh Informasi merupakan hak asasi manusia individu atau masyarakat, sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28, yang berbunyi: "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh Informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia". Berdasarkan amanat Undang-Undang tersebut di atas, maka Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota memiliki kewajiban untuk memenuhi hak dasar publik untuk memperoleh Informasi.

D. ASPEK STRATEGIS ORGANISASI

Dalam Rangka memenuhi kebutuhan dasar masyarakat akan informasi maka pemerintah, khususnya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menetapkan berbagai program, strategi, arah kebijakan dan kegiatan secara tepat, responsive dan adaptif sesuai harapan dan kebutuhan masyarakat. Namun yang menjadi permasalahan utama Pemerintah Kabupaten Bone adalah bagaimana Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone khususnya menyangkut penyediaan Sarana dan Prasarana (Infrastruktur) teknologi Informasi. Selain itu, perlunya menetapkan kembali regulasi yang berkenaan dengan teknologi Informasi guna mendukung pemerataan akses data dan informasi di berbagai sektor.

Selanjutnya bagaimana mendorong inovasi-inovasi baru di bidang TIK yang ramah lingkungan dan berdaya saing tinggi, melalui upaya-upaya tersebut diharapkan akan dapat memenuhi kebutuhan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam memberikan pelayanan informasi yang lebih baik kepada Organisasi Perangkat Daerah pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Hal ini diharapkan akan dapat menjadi stimulasi dan kekuatan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dalam peningkatan TIK menuju Bone yang lebih baik.

Upaya lain yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam memenuhi kebutuhan OPD dan masyarakat akan akses internet yang berkualitas yaitu:

- Bekerjasama dengan pihak penyedia jaringan bandwidth untuk membangun jaringan internet ke seluruh OPD sampai yang akan tuntas pada tahun 2023 mendatang. Selain itu, dibangun juga titik free Wi-fi di area-area publik yang ramai pengunjung;
- Membangun inovasi SDDK untuk memenuhi kebutuhan OPD dan masyarakat akan informasi statistik sektoral yang saat telah bertransformasi menjadi aplikasi berbasis android;
- Berupaya untuk memperoleh aliran Dana Alokasi Khusus (DAK) dari Kementerian Kominfo yang nantinya akan digunakan untuk mengadakan sarana dan prasarana pendukung berupa peralatan teknologi informatika dan peralatan persandian yang memadai.

02

PERENCANAAN KINERJA

Penandatanganan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023

PERJANJIAN KINERJA

adalah dokumen yang berisikan komitmen antara pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja dan merupakan wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan integritas, akuntabilitas, transparansi, dan kinerja aparatur.

**TUJUAN DAN
SASARAN**

**STRATEGI DAN ARAH
KEBIAJAKAN**

**INDIKATOR
KINERJA
UTAMA**

**PERJANJIAN
KINERJA**

**STANDAR PENILAIAN
KINERJA**

A. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan dan sasaran pembangunan menurut misi merupakan arahan bagi pelaksanaan setiap urusan wajib dan pilihan dalam mendukung pelaksanaan visi pembangunan daerah. Sebagaimana yang telah dibahas sebelumnya Bidang Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik tujuan dan sasaran terdapat pada misi ke 1 (Pertama) yaitu Meningkatkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) dan Misi ke-5 (lima) yaitu Mendorong Penciptaan Iklim Investasi yang kondusif untuk Pengembangan Usaha dan Mengembangkan Inovasi Daerah dalam Peningkatan Pelayanan Publik. Untuk mewujudkan Visi Misi yang diinginkan, Perlu ditetapkan tujuan yang mengarah pada titik sasaran yang akan di capai dengan tetap mengacu pada pernyataan Visi dan Misi Bupati Terpilih serta dengan memperhatikan isu-isu strategis. Adapun tujuan yang akan dicapai oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yaitu "Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebaran Luasan Informasi".

Atas dasar tujuan yang diinginkan tersebut, maka ditetapkan 5 (lima) sasaran yang akan dituju oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian tahun 2018-2023 yang dirumuskan melalui bagan di bawah ini:



Kelima sasaran di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 2.1
Matriks Tujuan dan Sasaran Renstra Perubahan 2018-2023

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Hasil Evaluasi SAKIP Oleh APIP			BB	BB	A
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian			85%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo			70%	75%	85%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah			100%	100%	100%
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)			525	584	600

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023

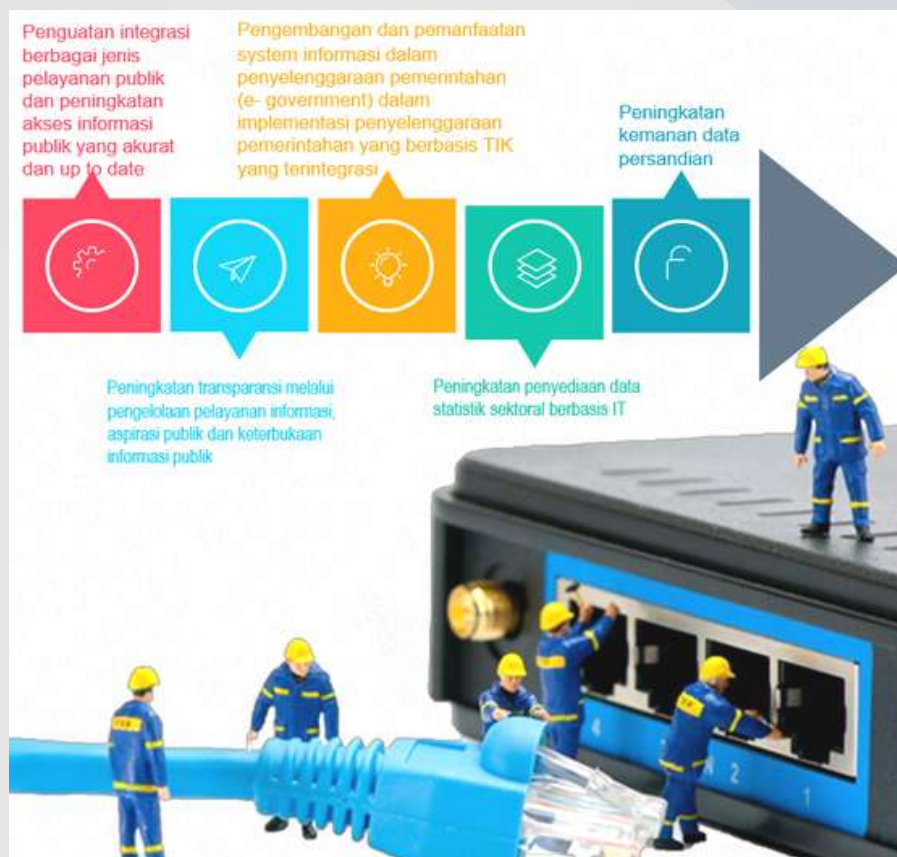


Renstra Perubahan
Diskominfo Tahun
2018-2023
(Pemutakhiran
Kepmendagri 050-
5889) Tahun 2021

B. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone melakukan berbagai strategi, kebijakan dan program. Strategi dimaksud merupakan pemilihan langkah-langkah yang menyeluruh dan terpadu dalam implementasi perencanaan strategik, yang meliputi penetapan program dan serangkaian kegiatan dengan memperhatikan segala sumberdaya dan lingkungan yang ada. Adapun strategi yang dilaksanakan dalam mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tertuang dalam bagan di samping



Arah Kebijakan

Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam mengembangkan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan sinergisitas dalam mewujudkan sasaran, tujuan serta visi dan misi organisasi. Adapun arah kebijakan pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian tertuang dalam bagan di samping.

Berdasarkan bagan-bagan di atas, maka Tujuan, Sasaran, Arah Kebijakan dan Strategi Renstra Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023 yang ditarik dari visi misi RPJMD Perubahan Kabupaten Bone dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan
Renstra Perubahan 2018-2023

VISI	Masyarakat Bone yang Mandiri, Berdaya Saing dan Sejahtera			
Misi I	Meningkatkan Tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN)			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya	Penguatan integrasi berbagai jenis pelayanan publik dan peningkatan akses informasi publik yang akurat dan up to date
Misi V	Mendorong penciptaan iklim investasi yang kondusif untuk pengembangan usaha dan mengembangkan inovasi daerah dalam peningkatan pelayanan publik			
	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Meningkatkan keterbukaan dan akses masyarakat terhadap informasi dan aspirasi publik	Peningkatan transparansi melalui pengelolaan pelayanan informasi, aspirasi publik dan keterbukaan informasi publik
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Mengembangkan dan memanfaatkan system informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government)	Pengembangan dan pemanfaatan sistem informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan (e-government) dalam implementasi penyelenggaraan pemerintahan yang berbasis TIK yang terintegrasi
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Meningkatkan data statistik sektoral dan sistem sarana prasarana penyediaan data statistik sektoral	Peningkatan penyediaan data statistik sektoral berbasis IT
		Meningkatnya Keamanan Informasi	Mengembangkan dan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan persandian	Peningkatan keamanan data persandian

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

C. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran atau indikator kinerja Organisasi Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran organisasi. Oleh karena itu, wajib hukumnya setiap OPD merumuskan dan menetapkan Indikator Kinerja Utama. Dinas Komunikasi,

Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah merumuskan Indikator Kinerja Utama dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Noor 36 Tahun 2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Kabupaten Bone Tahun 2018-2023. Indikator Kinerja Utama Organisasi Perangkat Daerah, kemudian ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 101 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone Nomor 87 Tahun 2016 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bone.

Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2021-2023

No	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN FORMALASI CAPAIAN TARGET	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB	TARGET		
						2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7		
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Hasil evaluasi SAKIP Oleh APIP	Laporan Hasil Evaluasi Implementasi SAKIP Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian oleh Inspektorat Kab. Bone	Sekretariat	BB	BB	A
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian	Jumlah layanan publik diselenggarakan secara online dan terintegrasi x 100 % Jumlah layanan publik	Laporan Triwulan pada Bidang Komunikasi, dan Bidang Informasi Publik	Bidang Komunikasi Publik & Bidang Humas dan Informasi Publik	85%	100%	100%
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo	Jumlah OPD yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo x 100 % Jumlah OPD	Laporan Triwulan pada Bidang TI	Bidang Teknologi Informatika	70%	75%	85%
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Daerah (OPD) yang menggunakan Data Statistik dalam menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah OPD yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan x 100 % Jumlah OPD	Laporan Triwulan pada Bidang Statistik	Bidang Statistik	95%	100%	100%
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Jumlah nilai per area keamanan informasi x 100 % Jumlah area penilaian	Laporan Triwulan pada Bidang Persandian	Bidang Persandian	525	584	600

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023



D. PERJANJIAN KINERJA

Scan QR Code di samping untuk melihat dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan 2023



Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun. Perjanjian kinerja disepakati bersama antara penerima dan pemberi amanah dan merupakan ikhtisar Rencana Kinerja Tahunan yang telah disesuaikan dengan ketersediaan anggaran.

Dalam perjanjian kinerja dimuat tujuan/sasaran strategis, indikator kinerja, target serta program yang dilakukan dalam mendukung pencapaian tujuan/sasaran dan pengalokasian anggaran pada masing-masing program. Uraian dari perjanjian kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program	Anggaran (Rp)
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.116.070.723
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100	Informasi dan Komunikasi Publik	686.064.490
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85	Aplikasi Informatika	2.065.806.400
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	Penyelenggaraan Statistik Sektoral	98.120.050
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	600	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	60.767.850

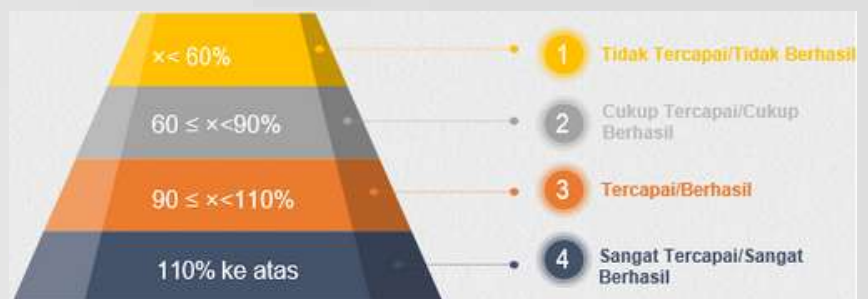
Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

E. STANDAR PENILAIAN

Pengukuran Kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Instansi Pemerintah.

How To:

Adapun Skala yang digunakan terkait dengan Perhitungan Capaian Kinerja Evaluasi SAKIP yang menggunakan predikat sebagai target, berdasarkan tingkatan yang diatur dalam permenpan 12 tahun 2015, dapat dilihat pada uraian berikut:



Keterangan	Skor
AA (Sangat Memuaskan)	7 (Tujuh)
A (Memuaskan)	6 (Enam)
BB (Sangat Baik)	5 (Lima)
B (Baik)	4 (Empat)
CC (Cukup)	3 (Tiga)
C (Kurang)	2 (dua)
D (Sangat Kurang)	1 (Satu)

Dari uraian predikat capaian berdasarkan persentase di atas, maka setiap indikator kinerja dari sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dapat dinilai tingkat keberhasilan kinerjanya berdasarkan persentase capaian target indikator kinerja yang diperoleh dari perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja yang telah ditetapkan.



03

AKUNTABILITAS KINERJA



CAPAIAN
KINERJA
ORGANISASI

REALISASI
ANGGARAN

Akuntabilitas Kinerja Adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI



Dokumentasi Rapat Persiapan Penilaian Indeks SPBE 2023

Capaian Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone menunjukkan setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja. Pengukuran tersebut dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja indikator tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja dengan realisasinya. Capaian indikator kinerja tujuan/sasaran atas perjanjian kinerja mengacu pada tujuan/sasaran yang telah ditetapkan dalam, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023.

Untuk setiap pernyataan kinerja tujuan/sasaran strategis tersebut di atas dilakukan analisis capaian kinerja tahun 2023 sebagai berikut:

1. TARGET DAN REALISASI KINERJA

Capaian kinerja tahun anggaran 2023 merupakan hasil pengukuran capaian kinerja sasaran yang diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja dengan membandingkan target kinerja dan realisasi tahun 2023 sebagaimana dijelaskan melalui tabel target dan realisasi kinerja tahun 2023.

Berdasarkan data pada tabel, dari 5 (lima) tujuan/sasaran strategis terdapat 3 (tiga) sasaran dengan pencapaian mencapai target dan 1 (satu) sasaran yang melampaui target, dan 1 (satu) sasaran tidak mencapai target dengan total capaian 494,83%. Jika dirata-ratakan capaian kelima sasaran di atas sebesar 98,97% atau berada pada predikat tercapai/berhasil

TUJUAN >

Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

INDIKATOR>

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang komunikasi Informatika

Sasaran 1

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi dan Persandian

Indikator: Predikat SAKIP oleh APIP

Sasaran 2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

Indikator: Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Sasaran 3

Meningkatnya Akses dan Kulaitas Layanan E-Government

Indikator: Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo

Sasaran 4

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor

Indikator: Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah

Sasaran 5

Menigkatnya Keamanan Informasi

Indikator: Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tabel 3.1
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

N o	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2023	Realisasi 2023	Capaian 2023	Ket.
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	*A	100,00	Mencapai Target
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100	100	100,00	Mencapai Target
3	Meningkatnya Akses dan Kulaitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85	87,69	103,16	Melampaui Target
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100,00	Mencapai Target
5	Menigkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	600	550	91,67	Tidak Mencapai Target
Total					494,83	
Rata-Rata					98,97	

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023



Dokumen Digital | CAPAIAN IKU | 2023

2. REALISASI DAN CAPAIAN KINERJA 2018-2023

Perubahan Renstra berdasarkan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 berdampak pada perubahan secara menyeluruh dari tujuan/sasaran, program, kegiatan yang ada pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dan ditambah dengan Sub Kegiatan. Hal ini berakibat data realisasi kinerja tahun 2018-2020 tidak dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021-2023 karena mengalami perubahan indikator. Oleh karena itu, dibuat 2 (dua) tabel perbandingan realisasi berdasarkan indikator Renstra pokok dan tabel perbandingan berdasarkan indikator Renstra Perubahan.

Tahun 2023 merupakan tahun kelima pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2018-2023, dan merupakan tahun ke 3 (tiga) pelaksanaan Rencana Strategis Perubahan Tahun 2018-2023 sehingga realisasi tahun 2023 sudah dapat dibandingkan dengan realisasi tahun 2021 dan 2022.

Tabel 3.2
Realisasi Kinerja Tahun 2018-2020

Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja		Capaian Kinerja (%)	
			2019	2020	2019	2020
Meningkatnya Akses Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Media/Saluran Informasi yang Efektif	100%	100%	100%	100	100
	Persentase Pemenuhan Data dan Informasi Publik	100%	100%	100%	100	100
	Jumlah Konten Informasi di Bidang Pemerintahan, Pembangunan, dan Kemasayarakatan yang dipublikasikan	100%	100%	100%	100	100
	Persentase Aspirasi/Aduan yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100	100
Meningkatnya Kualitas Layanan E-Government	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100%	58%	75%	100	100
	Persentase E-Government yang terintegrasi	100%	46%	61%	100	100
Meningkatnya Pemanfaatan Data Statistik Daerah	Persentase Dokumen Statistik Daerah Dirilis Tepat Waktu	100%	80%	90%	100	100
Meningkatnya Keamanan Data Komunikasi Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Memanfaatkan Sandi Pengamanan Data Komunikasi	100%	100%	100%	100	100
Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Urusan Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat hasil evaluasi SAKIP oleh APIP	C	B	BB	100	100

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Tabel 3.3
Realisasi Kinerja Tahun 2021-2023

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Data Awal 2018	Realisasi Kinerja			Capaian Kinerja (%)		
				2021	2022	2023	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	CC	A	BB	*A	120,00	96,99	100,00
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian		100	100	100	117,65	100,00	100,00
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo		72,73	84,62	87,69	103,90	112,83	103,16
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah		100	100	100	105,26	100,00	100
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)		525	585	550	100,00	100,17	91,67

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

Berdasarkan data di samping dapat dijelaskan bahwa tingkat capaian Kinerja pada tahun 2023 berada pada kisaran 91,67-103,16 dengan penjelasan sebagai berikut:

Tujuan

Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi

Indikator:

Indeks Penyelenggaraan Pemerintah Bidang Komunikasi Informatika

SASARAN 1

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian

Indikator

Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP dengan capaian kinerja **100,00%**





SASARAN 2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

Indikator

Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan capaian kinerja **100,00%**



SASARAN 4

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik sektoral



Indikator

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja **100,00%**



SASARAN 3

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government



Indikator

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan capaian kinerja **103,16%**

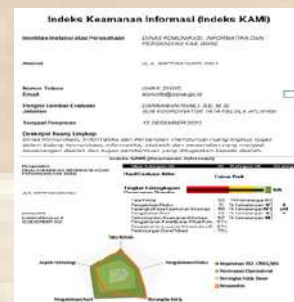


SASARAN 5

Meningkatnya Keamanan Informasi

Indikator

Indeks Informasi Keamanan dengan capaian kinerja **91,67%**



Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa karena adanya perubahan regulasi sehingga berimbas pada perubahan Rencana Strategis OPD dengan area perubahan mulai dari tujuan/sasaran sampai dengan indikator kinerja output sehingga data yang dapat dibandingkan adalah data tahun 2019-2020 dan data tahun 2021-2023.

3. REALISASI KINERJA YANG MENGACU PADA TARGET JANGKA MENENGAH RENSTRA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran adalah dengan membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tercantum pada Rencana Strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2021-2023 seperti dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah Renstra 2018-2023

N o	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target Jangka Menengah	Realisasi 2023	Capaian 2023
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIC	A	*A	100,00
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100	100	100,00
3	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85	87,69	103,16
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100,00
5	Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	600	550	91,67
Total					494,83
Rata-Rata					98,97

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

Berdasarkan data di atas, dapat dilihat bahwa terdapat 4 (empat) sasaran yang telah mencapai target kinerja jangka menengah pada tahun ke-5 periode Renstra 2018-2023 yaitu, sasaran 1 Meningkatkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian yang diampu oleh Sekreatariat Dinas, sasaran 2 yang diampu oleh Bidang Komunikasi Publik dan Bidang Humas dan Informasi Publik, sasaran 3 yang diampu oleh Bidang Teknologi Informatika dan sasaran 4 yang diampu oleh Bidang Statistik.



Sementara 1 sasaran lainnya tidak mencapai target jangka menengah yaitu sasaran 5 Meningkatkan Keamanan Informasi yang diampu oleh Bidang Persandian dengan realisasi 550 dari target 600 atau dengan capaian **91,67%**.

4. REALISASI KINERJA DAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL/STANDAR NASIONAL LAINNYA

Analisa berikutnya dalam mengukur capaian kinerja tujuan/sasaran strategis adalah dengan membandingkan realisasi kinerja indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dengan target dan realisasi standar pelayanan minimal/standar nasional lainnya.

Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian bukan OPD pengampu Standar Pelayanan Minimal sehingga tidak ada target Standar Pelayanan Minimal ataupun Standar Nasional lainnya.



Tabel 3.5
Perbandingan Realisasi Kinerja dan Standar Pelayanan Minimal/Standar Nasional Lainnya

No	Tujuan/Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja 2023	Standar Nasional	
				Target 2022	Target 2023
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	*A	-	-
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100	-	-
3	Meningkatnya Akses dan Kulaitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	87,69	-	-
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	-	-
5	Menigkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	550	-	-

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

5. ANALISA PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN

Untuk menganalisa keberhasilan atau kegagalan indikator kinerja dalam rangka pencapaian tujuan/sasaran strategis, dapat kita lihat pada tabel ikhtisar pencapaian kinerja sebagai berikut:

Tabel 3.6
Ikhtisar Pencapaian Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	% Capaian	Rata-Rata Capaian	Predikat			
					>110	$90 \leq s/d < 110$	$60 \leq s/d < 90$	<60
					Sangat Berhasil	Berhasil	Cukup Berhasil	Tidak Berhasil
1	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	100,00			√		
2	Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100,00			√		
3	Meningkatnya Akses dan Kulaitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	103,16			√		
4	Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100,00			√		
5	Menigkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	91,67			√		
Total Capaian			494,83	98,97		√		

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

PENYEBAB KEBERHASILAN DAN KEGAGALAN CAPAIAN KINERJA SASARAN

Berdasarkan data pada tabel 3.6 di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum realisasi capaian indikator tujuan/sasaran strategis Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun 2023 dalam kategori **BERHASIL**. Uraian penyebab keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja dari 5 (lima) sasaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone dapat dilihat pada uraian berikut:

SASARAN 1

MENINGKATNYA SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Sasaran 1 (satu) diampu oleh 1 (satu) indikator yaitu Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP dengan realisasi kinerja *A dari target A dalam kategori **BERHASIL** dengan capaian **100,00%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

1. Adanya kenaikan nilai yang signifikan mulai dari perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, dan pencapaian kinerja yang didorong oleh adanya keselarasan dokumen dan data dukung dari seluruh komponen penilaian;
2. Pemenuhan laporan dan data dukung evaluasi yang memadai disertai dengan publikasi melalui website;
3. Peningkatan sistem pelaporan dan pencapaian kinerja program pendukung serta adanya keterlibatan pimpinan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga monitoring dan evaluasi.

Dokumen Digital | NILAI SAKIP | 2022



Dokumentasi SAKIP dan RB AWARD 2023

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Adanya perubahan regulasi penilaian dari Permenpan Nomor 12 Tahun 2016 ke Permenpan Nomor 88 Tahun 2021;
2. Perubahan jumlah indikator penilaian SAKIP yang sebelumnya terdapat 6 indikator menjadi 5 indikator penilaian.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 1 yaitu:

1. Melakukan evaluasi rutin terkait capaian kinerja untuk menentukan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian kinerja;
2. Pemenuhan dan penerapan maksimal terhadap 5 indikator penilaian SAKIP.

SASARAN 2

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI DAN ASPIRASI PUBLIK

Sasaran 2 (dua) dengan indikator Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dengan realisasi kinerja 100% dari target kinerja 100% dalam kategori **BERHASIL** dengan capaian **100,00%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 2 sebagai berikut:

1. Komitmen Pimpinan dalam peningkatan kualitas pelayanan informasi dan komunikasi;
2. Publikasi yang intens dan up to date melalui website <https://bone.go.id/> atau <https://kominfo.bone.go.id/>, konten humas bone melalui media facebook, Instagram, maupun twitter, PPID, KIM serta radio SBB maupun kerjasama dengan media dalam rangka penyebarluasan informasi pembangunan dan pemerintahan sehingga informasi dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat;
3. Adanya Peraturan Bupati Bone Nomor 23 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerjasama Publikasi Pemerintah Daerah melalui Media Massa, maka Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone melakukan seleksi ketat dalam melakukan terhadap media maupun mitra strategis pemerintah daerah dalam menyebarkan informasi sehingga informasi yang dihasilkan up to date, berkualitas, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dokumen Digital | PERBUP 23 | 2021



Dokumentasi Sosialisasi dan Pembinaan KIM Tahun 2023

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Tingginya intensitas maintenance aplikasi pendukung penyebarluasan informasi;
2. Keterbatasan anggaran berdampak pada tidak dilaksanakannya uji konsekuensi informasi yang dikecualikan;
3. Sarana dan prasarana kurang memadai sehingga beberapa media informasi yang dikelola tidak efektif menjangkau seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Bone.

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 2 yaitu:

1. Memaksimalkan pemanfaatan LPPL Radio SBB dalam penyebarluasan informasi;
2. Melakukan persuratan ke seluruh OPD terkait daftar informasi yang dikecualikan di OPD masing-masing;
3. Memanfaatkan website dan konten secara maksimal.



Dokumentasi Interkoneksi Jaringan 2023

SASARAN 3

MENINGKATNYA AKSES DAN KUALITAS LAYANAN E-GOVERNMENT

Sasaran 3 (tiga) dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan realisasi kinerja 87,69 dari target kinerja 85% dalam kategori **BERHASIL** dengan capaian **103,16%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 3 sebagai berikut:

1. Jumlah perangkat daerah yang terkoneksi dengan jaringan internet sebanyak 57 terdiri dari 38 Dinas dan Badan, 2 BLUD ditambah 17 Kecamatan;
2. Penyediaan domain dan sub domain di seluruh Organisasi Perangkat Daerah.



Dokumen Digital | Interkoneksi Jaringan | 2023

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Stabilitas dan koneksi jaringan terkadang lemot/buruk;
2. Keterbatasan anggaran pemeliharaan pengelolaan IT termasuk pemeliharaan jaringan FO dan maintenance website;
3. Rendahnya kapasitas server yang tidak mampu menampung seluruh sub domain dan aplikasi yang ada sehingga belum dapat dilakukan pengintegrasian terhadap seluruh aplikasi yang ada pada Pemerintah Kabupaten Bone

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 3 yaitu:

1. Supporting bandwidth dengan kecepatan 400 Mbps untuk memaksimalkan stabilitas dan konektivitas jaringan ke OPD yang telah terkoneksi dengan jaringan Diskominfo;
2. Peningkatan keamanan server secara terenkripsi;
3. Penyediaan fasilitas wifi publik pada acara-acara yang melibatkan masyarakat luas.

SASARAN 4

MENINGKATNYA KETERSEDIAAN DATA STATISTIK SEKTORAL

Sasaran 4 (empat) dengan indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan realisasi kinerja 100 dari target kinerja 100 dalam kategori **BERHASIL** dengan capaian **100,00%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 4 sebagai berikut:

1. Koordinasi yang intensif dan efektif dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa terkait tanggung jawab sebagai produsen data sektor untuk melaporkan perkembangan data statistik secara berkala dan berkelanjutan;
2. Seluruh Organisasi Perangkat Daerah telah menyusun perencanaan berbasis data;
3. Pengembangan aplikasi SIPBM berbasis android.

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas telah mencapai target, namun masih terdapat hambatan dalam pencapaiannya, yaitu:

1. Tidak adanya daftar kebutuhan data statistik sektoral dari OPD;
2. Sistem Bone Satu Data belum berjalan sepenuhnya.



Dokumentasi Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Statistik Tahun 2023

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 4 yaitu:

1. Optimalisasi fungsi grup pengelola data sektor Kabupaten Bone dalam melakukan komunikasi terkait pengelolaan data statistik sektoral;
2. Intensif melakukan komunikasi dan kerjasama dengan Badan Pusat Statistik Kabupaten Bone sebagai pembina statistik di daerah guna mengoptimalkan proses pengumpulan dan pemanfaatan data statistik sektoral di Kabupaten Bone;
3. Mengoptimalkan peran dan fungsi Forum Data Kabupaten Bone yang dibentuk melalui Peraturan Bupati Bone Nomor 30 Tahun 2021 tentang Sistem Satu Data untuk Pembangunan Daerah Kabupaten Bone.



Dokumen Digital | PERBUP 30 | 2021



Dokumentasi Penyusunan Ranperbup Manajemen Keamanan

SASARAN 5

MENINGKATNYA KEAMANAN INFORMASI

Sasaran 5 (lima) dengan indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan realisasi kinerja 600 dari target 550 dalam kategori **BERHASIL** dengan capaian **91,67%**.

FAKTOR PENDUKUNG KEBERHASILAN

Beberapa hal yang mendukung keberhasilan capaian indikator kinerja sasaran 5 sebagai berikut:

1. Adanya koordinasi yang baik antara penyaluran dan pengamanan akses informasi berita melalui Jaringan Komunikasi Sandi (JKS) dan pengelolaan informasi daerah melalui PPID;
2. Tersedianya perangkat dan jaringan teknologi informatika pada Organisasi Perangkat Daerah.

FAKTOR PENGHAMBAT

Pencapaian diatas tidak mencapai target, yang disebabkan oleh hambatan sebagai berikut:

1. Adanya perubahan versi penilaian mandiri Indeks KAMI dari versi 4.1 menjadi versi 5.0, dimana pada versi ini terdapat banyak indikator baru yang belum dipenuhi;
2. Belum adanya sertifikat ISO 27001 yang merupakan standar internasional terkait pengelolaan aset dan teknologi.



Dokumen Digital | INDEKS KAMI | 2023

UPAYA PENINGKATAN KINERJA

Upaya yang dilakukan oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone untuk meningkatkan capaian kinerja sasaran 5 yaitu:

1. Penyusunan Ranperbup Manajemen Keamanan Informasi;
2. Menyusun dan melengkapi SOP Manajemen Keamanan Informasi;
3. Membuat daftar aset dan manajemen resiko yang komprehensif dan ter-update.

6. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Sumber daya adalah nilai potensi yang dimiliki dalam mencapai tujuan/sasaran strategis yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategi. Sumber daya tersebut berupa sumber daya manusia, sarana prasarana, dan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2023 untuk melaksanakan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 214/PMK.02/2017 Tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Pengukuran efisiensi dilakukan dengan membandingkan penjumlahan dari selisih antara perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran dan realisasi anggaran keluaran dengan penjumlahan dari perkalian pagu anggaran keluaran dengan capaian keluaran.

Efisiensi adalah ukuran tingkat penggunaan sumber daya dalam suatu proses pencapaian tujuan/sasaran yang telah ditargetkan dalam jangka waktu tertentu. Semakin hemat/minim penggunaan sumber daya, maka proses pencapaian target semakin efisien. Berikut ini tabel analisis efisiensi sumber daya Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan tahun 2023.

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Kinerja			Anggaran			Efisiensi (%)
		Target	Realisasi	Capaian (%)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)	
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	A	*A	100,00	5.116.070.723	5.067.930.086	99,06	0,94
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	100	100	100,00	686.064.490	682.125.390	99,43	0,57
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	85	87,69	103,16	2.065.806.400	1.959.705.273	94,86	8,30
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	100	100	100,00	98.120.050	91.599.550	93,35	6,65
Meningkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	600	550	91,67	60.767.850	34.210.275	56,30	35,37
Total/Rata-Rata				98,97	8.026.829.513	7.835.570.574	97,62	1,35

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023

Berdasarkan hasil analisis efisiensi penggunaan sumber daya (anggaran) dengan perbandingan antara capaian kinerja dengan capaian realisasi anggaran, maka dapat dilihat bahwa terdapat efisiensi anggaran dan efektivitas penggunaan dana berdasarkan kinerja yaitu:

1. Indikator Predikat Evaluasi SAKIP Oleh APIP dengan capaian kinerja 100,00% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,06% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya sebesar 0,94%.
 2. Indikator Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian dengan capaian kinerja 100,00% dan capaian realisasi anggaran sebesar 99,43% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran dan penggunaan sumber daya sebesar 0,57%.
 3. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo dengan capaian kinerja 103,16% dan capaian realisasi anggaran sebesar 94,86% menunjukkan terdapat efisiensi anggaran sebesar 5,14% dan efisiensi penggunaan sumber daya sebesar 8,30%.
 4. Indikator Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah dengan capaian kinerja 100,00% dan capaian anggaran 93,35% menunjukkan bahwa terdapat efisiensi anggaran penggunaan sumberdaya sebesar 6,65%.
 5. Indikator Indeks Keamanan Informasi (KAMI) dengan capaian kinerja 91,67% dan capaian anggaran 56,30% menunjukkan efisiensi anggaran sebesar 43,70% dan efisiensi penggunaan penggunaan sumber daya sebesar 35,37%.
- 7. ANALISIS PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN YANG MENUNJANG KEBERHASILAN/KEGAGALAN PENCAPAIAN KINERJA**

Analisis terhadap program/kegiatan/sub kegiatan yang dilaksanakan Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone sebagai berikut:

Tabel 3.8
Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan Pencapaian Kinerja

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
1	Meningkatkan Implementasi Teknologi Informasi dalam Menjaga Keamanan Data Komunikasi dan Penyebarluasan Informasi	Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	Predikat	A	5.116.070.723	*A	5.067.930.086	100,00	99,06	Kapasitas SDM tidak memadai	Upaya peningkatan kapasitas SDM dan motivasi untuk meningkatkan kinerja	Memberikan reward kepada penanggung jawab kegiatan sesuai indikator pemberian reward yang telah ditetapkan
		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rata-Rata Capaian Kinerja Indikator Program Teknis Perangkat Daerah	%	100	5.116.070.723	100	5.067.930.086	100,00	99,06	Jumlah dan kapasitas SDM Aparatur yang terbatas	Perlu adanya dukungan penuh dari unsur pimpinan pada setiap pelaksanaan program	Melakukan upaya peningkatan kapasitas SDM Aparatur
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun selama 1 Tahun	Dok.	25	71.261.850	26	70.375.850	104,00	98,76	Tidak adanya staf ASN yang dapat membantu pelaksanaan tugas perencanaan, penganggaran, evaluasi, dan pelaporan	Perlu adanya staf ASN untuk membantu membackup penyusunan dokumen dan pelaporan	Memaksimalkan peran tenaga non ASN dalam membantu penginputan dokumen perencanaan dan pelaporan
		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah yang tersusun	Dok	6	13.178.650	7	13.137.650	116,67	99,69	Terbatasnya waktu pada setiap tahapan perencanaan dan penganggaran	Penambahan personil aparatur untuk menghandle masing-masing tahapan	Melaksanakan time scedule secara disiplin sesuai dengan rencana aksi
		Koordinasi dan Penyusunan Kaporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Lap.	19	58.083.200	19	57.238.200	100,00	98,55	Banyaknya dokumen yang harus disusun dalam waktu yang bersamaan tidak didukung dengan SDM yang memadai	Penyediaan SDM yang memadai baik dari segi kuantitas maupun kualitas	Menyelesaikan dokumen pelaporan semaksimal mungkin sesuai dengan jadwal pelaksanaannya

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Cakupan Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang Baik	%	100	2.898.810.213	100	2.894.505.713	100,00	99,85	Keterbatasan jumlah staf yang memadai untuk menangani tugas-tugas administrasi keuangan	Membentuk tim kecil dengan tanggungjawab yang jelas	Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan staf yang sudah ada untuk meningkatkan produktivitas
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org/ Bulan	32	2.886.351.413	32	2.883.351.413	100,00	99,90	Kurangnya alokasi anggaran untuk pembayaran TPP	Melakukan pembayaran TPP sesuai kemampuan alokasi anggaran yang tersedia	Pembayaran TPP yang tidak tercover dibayarkan pada tahun anggaran berikutnya
		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Lap.	19	12.458.800	19	11.154.300	100,00	89,53	Sering terjadi keterlambatan pemindahbukuan belanja LS dari sistem penatausahaan keuangan	Pemindahbukuan yang sejalan dengan waktu pencairan SP2D	Melakukan pengecekan secara manual antara SP2D yang cair dengan pemindah bukuan transaksi pada sistem
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Pegawai yang Mengikuti Program Peningkatan Kapasitas Pendukung	%	100	10.000.000	100	9.000.000	100,00	90,00	Rendahnya kapasitas SDM	Peningkatan kapasitas SDM yang ada	Keikutsertaan dalam program peningkatan kapasitas aparatur
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang	2	10.000.000	2	9.000.000	100,00	90,00	Rendahnya alokasi anggaran untuk peningkatan kapasitas aparatur	Penambahan alokasi anggaran peningkatan kapasitas aparatur	Ikut serta dalam peningkatan kapasitas aparatur secara daring
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Cakupan Layanan Administrasi Perkantoran	%	100	652.133.420	100	624.957.851	100,00	95,83	Keterbatasan sumber daya dan penyebaran tugas yang tidak merata	Penempatan sumber daya sesuai dengan analisis beban kerja	Mengoptimalkan peran sumber daya yang ada
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang disediakan	Paket	1	4.597.600	1	4.597.600	100,00	100,00	Besarnya kebutuhan tidak didukung dengan alokasi anggaran yang memadai	Minimalisasi penggunaan sesuai tingkat skala prioritas	Pemenuhan kebutuhan sesuai dengan kemampuan anggaran

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang disediakan	Paket	12	106.817.660	12	102.673.970	100,00	96,12	Tidak adanya daftar kebutuhan barang rutin dari Bidang	Stok barang sesuai RAK	Penyaluran barang sesuai permintaan dan stok yang ada
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang disediakan	Paket	1	2.932.560	1	2.932.560	100,00	100,00	Kurangnya jumlah barang yang terdapat dalam DPA	Memanfaatkan barang seefisien mungkin	Penyediaan barang sesuai rencana
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang disediakan	Paket	12	294.518.000	12	290.160.200	100,00	98,52	Alokasi anggaran tidak berbanding lurus dengan jumlah pegawai	Memberlakukan jadwal penyediaan bahan logistik untuk Bidang dan Sekretariat	Melakukan penyesuaian anggaran dengan belanja
		Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang disediakan	Paket	4	49.223.600	4	49.223.600	100,00	100,00	Terlambatnya desain cetak kalender tahun 2024	Desain kalender oleh desain grafis	Cetak kalender sesuai desain sebelum tahun berjalan berakhir
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Lap.	12	194.044.000	12	175.369.921	100,00	90,38	Tingginya harga tiket dibanding harga satuan di DPA	Mencari harga terbaik di beberapa penyedia tiket	Melakukan pemesanan tiket jauh-jauh hari sebelum keberangkatan
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Cakupan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	%	100	1.189.259.990	100	1.184.041.300	100,00	99,56	Jumlah unit yang kurang tidak selaras dengan alokasi anggaran	Mengajukan penambahan alokasi anggaran pengadaan barang	Menyusun RKBMD dan telaahan staf untuk penambahan alokasi anggaran
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang disediakan	Unit	49	1.189.259.990	49	1.184.041.300	100,00	99,56	Beberapa barang penyedia tidak sesuai dengan spek	Rekomendasi ganti item barang sesuai hasil pemeriksaan	Penyedia mengganti item barang yang tidak sesuai spek
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Pelayanan Administrasi Perkantoran	%	100	249.518.400	100	243.189.744	100,00	97,46	Upah teaga kontrak yang tidak sesuai dengan beban kerja	Kenaikan upah sesuai beban kerja	Usulan kenaikan upah untuk beberapa orang tenaga kontrak sesuai beban kerja
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang disediakan	Lap.	12	249.518.400	12	243.189.744	100,00	97,46	Upah teaga kontrak yang tidak sesuai dengan beban kerja	Kenaikan upah sesuai beban kerja	Usulan kenaikan upah untuk beberapa orang tenaga kontrak sesuai beban kerja

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Cakupan Sarana dan Prasarana Aparatur dalam Kondisi Baik	%	100	45.086.850	100	41.859.628	100,00	92,84	Jumlah sarana dan prasarana yang terbatas	Menjaga dan merawat sarana dan prasarana dengan baik agar dapat berfungsi baik	Melakukan perawatan berkala terhadap sarana dan prasarana yang ada
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	3	32.606.850	3	29.379.628	100,00	90,10	Jumlah kendaraan dinas yang terbatas	Menambah jumlah unit sesuai dengan jumlah jabatan	Melakukan pemeliharaan kendaraan dinas secara berkala
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang dipelihara	Unit	22	12.480.000	22	12.480.000	100,00	100,00	Jumlah peralatan dan mesin terbatas	Menambah jumlah unit sesuai kebutuhan	Melakukan pemeliharaan berkala
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi dan Informatika dan Persandian	%	100	686.064.490	100	682.125.390	100,00	99,43	Kesenjangan akses masyarakat pada wilayah-wilayah terluar	Mendirikan pusat informasi komunitas di daerah terluar/ terpencil yang dilengkapi dengan akses internet gratis	Meningkatkan peran KIM dan pengelolaan konten layanan publik melalui berbagai media
		Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik	Persentase Media Saluran Informasi dan Aspirasi Publik yang Efektif	%	100	686.064.490	100	682.125.390	100,00	99,43	Kapasitas SDM tidak memadai	Peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan dan sejenisnya	Meningkatkan peran SDM yang ada semaksimal mungkin
		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten	%	88	686.064.490	100	682.125.390	113,64	99,43	Kurangnya SDM pengelola dan informasi dan komunikasi publik	Menambah personil dan peningkatan kapasitas SDM yang pengelola informasi dan komunikasi publik yang ada	Sosialisasi program dan kebijakan melalui media luar ruang dan media sosial
		Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Dok.	12	16.596.000	12	15.750.000	100,00	94,90	Mutasi admin utama LAPOR	Pergantian admin	Menunjuk aparat baru sebagai admin SPAN LAPOR

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Kounikasi Pemerinrah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dsn Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok.	12	10.133.900	12	10.133.900	100,00	100,00	Jumlah SDM yang tidak memadai	Bekerjasama dengan protokol pimpinan terkait agenda prioritas pimpinan	Meminta agenda rutin pimpinan pada pihak protokol pimpinan
		Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Dok.	12	148.290.000	12	146.390.000	100,00	98,72	Kurang alokasi anggaran baliho dan spanduk untuk kegiatan yang sifatnya insidentil	Menctak baliho dan spanduk sesuai kemampuan anggaran	Memaksimalkan pengelolaan konten melalui media sosial
		Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Dok.	12	17.903.640	12	17.868.640	100,00	99,80	Sinyal pesawat yang kadang mengalami gangguan	Peremajaan pesawat yang sudah tidak efektif	Pengadaan pesawat baru
		Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dok.	12	23.343.950	12	23.316.550	100,00	99,88	OPD yang kurang aktif dalam mengupdate dokumen/data	Penguatan peran PPID pembantu di seluruh OPD	Pro aktif mengupdate dokumen/data pada PPID utama
		Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Jumlah Dokumen Kemitraan Dengan Pemangku Kepentingan	Dok.	12	19.060.000	12	18.989.600	100,00	99,63	Peralatan yang kurang memadai	Peremajaan peralatan yang sudah tidak layak pakai	Pengadaan perangkat/ peralatan sound system baru
		Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya	Orang	50	8.955.000	50	8.646.700	100,00	96,56	Kurangnya berita/ informasi dari KIM di Kecamatan	Penguatan peran anggota KIM Kecamatan	Sosialisasi peningkatan kapasitas anggota KIM
		Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat, Media, dan Kemitraan Komunitas	Jumlah Dokumen Kemitraan dengan Masyarakat, Media, dan Komunitas dalam Mendesiminasiakan Informasi Program atau Kebijakan	Dok.	12	441.782.000	12	441.030.000	100,00	99,83	Lambatnya proses kontrak kerjasama media	Mitra media harus melengkapi seluruh dokumen persyaratan untuk melakukan kontrak kerjasama	Pemberian batas waktu yang jelas untuk melengkapi persyaratan kontrak

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	%	85	2.065.806.400	87,69	1.959.705.273	103,16	94,86	Terbatasnya alokasi anggaran penyediaan akses internet untuk OPD	Alokasi anggaran yang memadai	Penyediaan akses internet ke OPD melalui negosiasi dengan pihak penyedia
		Program Aplikasi Informatika	Persentase Aplikasi yang Terintegrasi	%	50	2.065.806.400	50	1.959.705.273	100,00	94,86	Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk pengintegrasian aplikasi	Alokasi anggaran sesuai kebutuhan pengintegrasian aplikasi	Pergeseran anggaran untuk pengintegrasian aplikasi
		Pengelolaan Nama Domain yang telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Domain yang Dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Bone	%	100	1.585.393.600	100	1.585.393.600	100,00	100,00	Rendahnya intensitas berita yang diupload oleh admin sub domain	Penerapan sistem 1 berita 1 sub domain per hari	Peningkatan kapasitas menulis berita bagi admin sub domain
		Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintah Daerah	Unit	54	1.585.393.600	57	1.585.393.600	105,56	100,00	Kecepatan jaringan yang terkadang tidak stabil	Jaminan stabilitas jaringan dari penyedia	Layanan gangguan jaringan untuk seluruh OPD
		Pengelolaan E-Government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pengelolaan E-Government di Lingkup Daerah Kab./Kota	%	100	480.412.800	100	374.311.673	100,00	77,91	Adanya defisit anggaran yang mengakibatkan tidak cainya dana pengintegrasian aplikasi	Pengalokasian dalam daftar utang untuk dibayarkan pada tahun anggaran berikut	Penyampaian daftar utang ke Tim Anggaran Pemerintah Daerah
		Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Dok.	12	277.928.250	12	274.899.123	100,00	98,91	Kurangnya alokasi anggaran untuk sosialisasi arsitektur SPBE	Penyediaan anggaran untuk sosialisasi arsitektur SPBE	Membuat telaahan staf untuk alokasi anggaran sosialisasi arsitektur SPBE di tahun berikutnya

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Pengembangan Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik	Jumlah Aplikasi dan Proses Bisnis Pemerintahan Berbasis Elektornik yang Dikembangkan	Unit	2	115.181.950	2	15.111.950	100,00	13,12	Defisit anggaran	Pembayaran utang pekerjaan melalui alokasi anggaran di tahun 2024	Penyampaian besaran utang yang akan dibayarkan ke Tim Anggaran pemerintah Daerah
		Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Komunikasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Pengembangan dan Pengelolaan Sumber Daya Teknologi dan Informasi dan Komunikasi Pemerintah Daerah	Dok.	12	87.302.600	12	84.300.600	100,00	96,56	Alokasi anggaran yang tidak memadai untuk kegiatan sosialisasi/bimtek pengembangan SDM	Lakukan kegiatan pengembangan SD TI sesuai kemampuan anggaran	Membuat proposal ke beberapa sponsor untuk mendukung pelaksanaan kegiatan
		Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	98.120.050	100	91.599.550	100,00	93,35	Belum diterapkannya program Bone Satu Data	Melakukan langkah percepatan penerapan Bone Satu Data	Menghimpun data statistik sektoral dari masing-masing OPD Pengampu
		Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah	%	100	98.120.050	100	91.599.550	100,00	93,35	Belum diterapkannya program Bone Satu Data	Melakukan langkah percepatan penerapan Bone Satu Data	Menghimpun data statistik sektoral dari masing-masing OPD Pengampu
		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase OPD yang Menggunakan Data Statistik dalam Melakukan Evaluasi Pembangunan Daerah	%	100	98.120.050	100	91.599.550	100,00	93,35	Tidak ada daftar kebutuhan data statistik sektoral dari OPD	Menyediakan data statistik sektoral dasar berdasarkan kebutuhan tahun-tahun sebelumnya	Menerbitkan buku BDA dan DASI PEMDA
		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pengumpulan, Pengolahan, Analisis, dan Diseminasi Data Statistik Sektoral	Dok.	12	48.720.000	12	45.505.000	100,00	93,40	Alokasi anggaran yang tidak memadai	Pelaksanaan kegiatan secara maksimal dengan anggaran yang tersedia	Melakukan koordinasi dengan OPD pengampu data statistik melalui kunjungan langsung maupun melalui WA grup

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Peningkatan Kapasitas SDM pemerintah Daerah dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Jumlah SDM yang Meningkat Kapasitasnya dalam Peningkatan Mutu Statistik Daerah yang Terintegrasi	Orang	2	8.269.500	3	8.269.500	150,00	100,00	Rendahnya kapasitas SDM pengelola data statistik sektoral	Peningkatan kapasitas melalui daring maupun luring	Ikut serta dalam kegiatan peningkatan kapasitas SDM secara daring by zoom
		Membangun Metadata Statistik Sektoral	Jumlah Metadata Statistik Sektoral yang Dihimpun	Dok.	12	41.130.550	12	37.825.050	100,00	91,96	Kapasitas SDM yang tidak memadai	Terapkan sistem crosscutting antar Bidang maupun antar OPD	Menyusun metadata melibatkan OPD terkait
		Menigkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	Nilai	600	60.767.850	550	34.210.275	91,67	56,30	Tingginya ancaman terhadap keamanan siber	Menerapkan kebijakan keamanan yang ketat	Quick respon tim TI saat terjadi ancaman keamanan siber
		Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah	%	100	60.767.850	100	34.210.275	100,00	56,30	Sarana dan prasarana persandian yang tidak memadai	Memaksimalkan pengamanan dengan sarana dan prsarana yang terbatas	Penerapan sistem elektronik untuk pengamanan informasi
		Penyelenggaraan Persandian untuk Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Keamanan Informasi dan Jaringan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	%	100	47.294.850	100	22.533.075	100,00	47,64	Kapasitas SDM pengamanan yang tidak memadai	Peningkatan kapasitas SDM pengelola TIK untuk pengamanan	Mengikutsertakan SDM pengelola TIK dalam diklat pengamanan
		Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Lap.	12	11.037.550	12	7.258.450	100,00	65,76	Keterbatasan perangkat TI untuk pengamanan informasi	Pengamanan informasi dengan perangkat yang tersedia	Pemanfaatan WA grup dan TTE

No	Tujuan	Sasaran/Program/ Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Outcome dan Output	Satuan Kinerja	Target	Anggaran (Rp)	Realisasi		Capaian (%)		Permasalahan	Solusi	Tindak Lanjut
							Kinerja	Anggaran (Rp)	Kinerja	Anggaran			
		Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Lap.	12	36.257.300	12	15.274.625	100,00	42,13	Defisit anggaran	Pembayaran utang pekerjaan melalui alokasi anggaran di tahun 2024	Penyampaian besaran utang yang akan dibayarkan ke Tim Anggaran pemerintah Daerah
		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah	%	100	13.473.000	100	11.677.200	100,00	86,67	Pola hubungan yang masih mengandalkan keberadaan jaringan	Peningkatan kapasitas jaringan	Menyediakan alternatif jaringan di luar jaringan utama
		Operasionalisasi Jaring Komunikasi Sandi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perangkat Daerah yang Terhubung dalam Jaring Komunikasi Sandi	PD	65	13.473.000	65	11.677.200	100,00	86,67	Masih terbatasnya perangkat persandian	Pengadaan perangkat dalam pengalokasian anggaran berikutnya	Membuat telaahan staf untuk diajukan ke Badan Anggaran Pemerintah Daerah
Total						8.026.829.513		7.835.570.574		97,62			

ULASAN TABEL ANALISIS

Berdasarkan tabel tentang Analisa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian kinerja, dapat dijelaskan hal sebagai berikut:

SASARAN 1

Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

INDIKATOR: PREDIKAT EVALUASI SAKIP OLEH APIP

Dengan target A telah Berhasil mencapai nilai A* atau tercapai **100,00%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 1 (satu) yang dilaksanakan Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada tahun 2023 melalui analisa capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- 1.Meningkatkan kualitas dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan kinerja.
- 2.Melengkapi administrasi dan dokumentasi seluruh pelaksanaan program/kegiatan serta bukti pendukung realisasi output maupun outcome yang dicapai.

SASARAN 2

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik

INDIKATOR: PERSENTASE LAYANAN PUBLIK DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA DAN PERSANDIAN

Dengan target kinerja 100% telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 100% atau tercapai **100,00%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Informasi dan Komunikasi Publik.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 2 (dua) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- 1.Meningkatkan kualitas dan daya tarik diseminasi informasi layanan publik.
- 2.Menambah rubrik pemberitaan pada website, konten instagram ataupun program pada LPPL Suara Bone Beradat terkait kiat-kiat sukses dan keseharian pejabat-pejabat pemerintah Kabupaten Bone.
- 3.Melakukan proses pengumuman dan penerimaan penawaran Kerjasama dari media/mitra strategis pada akhir tahun n-1 melalui belanja e-purchasing.

SASARAN 3

Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan E-government

INDIKATOR: PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG TERHUBUNG DENGAN AKSES INTERNET YANG DISEDIAKAN OLEH DINAS KOMINFO

Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan Oleh Dinas Kominfo dengan target kinerja 85% telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 87,69% atau tercapai **103,16%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Aplikasi Informatika.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 3 (tiga) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- 1.Melakukan peremajaan pada jaringan kabel Fiber Optik.
- 2.Menambah titik pengadaan bandwidth pada 8 (Delapan) Kecamatan.
- 3.Menambah titik penyediaan wifi publik pada kawasan-kawasan strategis yang banyak dikunjungi masyarakat.

SASARAN 4

Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektor

INDIKATOR: PERSENTASE ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (OPD) YANG MENGGUNAKAN DATA STATISTIK DALAM MENYUSUN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Dengan target kinerja 100% telah Berhasil mencapai realisasi kinerja 100% atau mencapai **100,00%**. Indikator ini dapat terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Statistik Sektor.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 4 (empat) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- 1.Terus meningkatkan pengembangan aplikasi SIPBM berbasis android.
- 2.Menguatkan dan meningkatkan koordinasi dengan seluruh Organisasi Perangkat Daerah, Kecamatan, Kelurahan, dan Desa menuju Kabupaten Bone Satu Data.

SASARAN 5

Meningkatnya Keamanan Informasi

INDIKATOR: INDEKS KEAMANAN INFORMASI

Dengan target kinerja 600 tidak mencapai target dengan realisasi kinerja 550 atau **91,67%**. Indikator ini terlaksana melalui Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi.

Berdasarkan hasil evaluasi program/kegiatan pada sasaran 5 (lima) tersebut di atas, ada upaya-upaya perbaikan yang harus dilakukan untuk pencapaian kinerja tahun berikutnya, yaitu:

- 1.Pemenuhan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan mumpuni di bidang persandian melalui pelatihan ataupun bimbingan teknis khususnya jabatan fungsional sandiman.
- 2.Pemenuhan peralatan pengamanan teknologi informatika dan persandian pada ruang lingkup Pemerintah Kabupaten Bone.

B. REALISASI ANGGARAN

Pagu anggaran belanja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 sebelum perubahan sebesar Rp. 8.578.618.020 (Delapan milyar lima ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu dua puluh rupiah) dan setelah perubahan menjadi Rp 8.026.829.513 (Delapan milyar dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan realisasi sebesar Rp. 7.835.570.574 (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 97,62%.



Uraian realisasi anggaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun Anggaran 2023 dapat dilihat lebih jelas pada tabel berikut:

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Anggaran		
		Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Meningkatnya Sistem Akuntabilitas Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP	5.116.070.723	5.067.930.086	99,06
Meningkatnya Akses dan Kualitas Layanan Informasi dan Aspirasi Publik	Persentase Layanan Publik Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian	686.064.490	682.125.390	99,43
Meningkatnya Akses dan Kulaitas Layanan E-Government	Persentase Organisasi Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	2.065.806.400	1.959.705.273	94,86
Meningkatnya Ketersediaan Data Statistik Sektoral	Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah	98.120.050	91.599.550	93,35
Menigkatnya Keamanan Informasi	Indeks Keamanan Informasi (KAMI)	60.767.850	34.210.275	56,30
Total/Rata-Rata		8.026.829.513	7.835.570.574	97,62

Sumber Data: Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian, Tahun 2023



04 PENUTUP



SIMPULAN UMUM



KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI



LAMPIRAN

RAPAT EVALUASI KINERJA

Rapat Evaluasi Kinerja merupakan agenda rutin Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone yang dilakukan setiap triwulan dan akhir tahun berjalan. Kegiatan ini merupakan media bagi pimpinan untuk melakukan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga menjadi bahan evaluasi bagi seluruh aparat untuk melakukan perbaikan di masa mendatang.

A. SIMPULAN UMUM

Pencapaian kinerja merupakan perwujudan sinergi seluruh jajaran Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian dalam menghadapi berbagai tantangan di tahun 2023. Namun demikian, upaya penyempurnaan dan perbaikan indikator kinerja harus terus dilakukan melalui penetapan indikator kinerja yang lebih berkualitas dengan target yang menantang. Selain itu, setiap risiko yang berpotensi menghambat pencapaian kinerja harus dapat diidentifikasi dan dimitigasi. Pencapaian Kinerja tersebut diwujudkan melalui Laporan Kinerja Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 dan merupakan salah satu bentuk pertanggung jawaban kinerja yang telah ditetapkan oleh organisasi dan menjadi salah satu bahan evaluasi atas sasaran yang ingin dicapai dalam dokumen perencanaan strategis 2018-2023. Rata-rata capaian kinerja berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja dengan target kinerja tahun 2023 berada pada angka 106,60 dengan kategori “Berhasil”.

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, selama 5 (lima) tahun pelaksanaannya, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat berita acara hasil revidi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone tahun sebelumnya, namun tidak dapat dipungkiri masih terdapat beberapa kelemahan dan kekurangan dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan.

Secara umum dalam mendukung pencapaian sasaran, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone pada tahun 2023 mendapatkan alokasi dana APBD sebesar Rp. 8.026.829.513 (Delapan milyar dua puluh enam juta delapan ratus dua puluh sembilan ribu lima ratus tiga belas rupiah) dengan terealisasi per 29 Desember 2023 sebesar Rp. 7.835.570.574 (Tujuh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta lima ratus tujuh puluh ribu lima ratus tujuh puluh empat rupiah) atau sebesar 97,62%

B. KENDALA PELAKSANAAN DAN UPAYA MENGATASI

Selama periode pelaksanaan Rencana Strategis Tahun 2018-2023, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone telah melakukan berbagai upaya perbaikan dengan melihat referensi dari hasil revidi internal Inspektorat Kabupaten Bone.

Meskipun demikian masih terdapat beberapa kendala dalam melaksanakan kinerja yang telah direncanakan, antara lain:

- Kurangnya sumber daya manusia yang handal dalam mendukung pelaksanaan kegiatan terkait konten publikasi, informasi kehumasan, layanan informasi publik, pengelolaan website, pengamanan jaringan dan aplikasi.
- Kurangnya sarana dan prasarana kerja dalam menunjang produktifitas kegiatan bidang komunikasi informatika, persandian maupun statistik.
- Masih adanya yang terlambat dalam menyampaikan capaian kinerja triwulanan beserta data dukung yang valid dan up to date untuk bahan pemenuhan data capaian dan data dukung laporan kinerja yang dibutuhkan setiap tahun.
- Laporan capaian kinerja yang disampaikan oleh Bidang rata-rata belum dilengkapi dengan analisis penyebab keberhasilan atau kegagalan serta rencana tindak lanjut.

- Belum optimalnya fasilitas teknologi informasi dalam mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dan pengelolaan data statistik sektoral.
- Belum optimalnya peralatan dan pemahaman serta pengawasan terhadap sistem manajemen keamanan informasi dan persandian daerah.

Dengan adanya kendala-kendala di atas, maka perlu dilakukan upaya yang dapat mendorong peningkatan kinerja ke depan, antara lain:

- Memanfaatkan sumber daya yang ada dengan semaksimal mungkin dan mendorong aparat pengelola untuk meningkatkan kompetensi dalam pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan urusan Komunikasi Informatika, Statistik dan Persandian melalui pelatihan dan bimbingan.
- Meningkatkan sarana dan prasarana penunjang produktifitas kegiatan bidang komunikasi informatika, persandian maupun statistik melalui pengadaan secara bertahap sesuai dengan kemampuan anggaran.
- Mendorong setiap bidang agar dapat menyampaikan capaian kinerja triwulanan beserta data dukung yang valid dan up to date agar tidak terjadi keterlambatan pemenuhan data capaian dan data dukung laporan kinerja yang dibutuhkan setiap tahun.
- Capaian kinerja yang disampaikan oleh semua bidang setiap bulan hendaknya disertai dengan analisis keberhasilan atau kegagalan atas capaian yang telah dilaksanakan serta rencana tindak lanjutnya untuk dijadikan sebagai bahan evaluasi bulan berikutnya.
- Menyusun rencana pemenuhan fasilitas teknologi informasi pendukung SPBE dan pengelolaan statistik sektoral melalui telaahan staf.
- Optimalisasi peralatan melalui pengadaan dan peningkatan pemahaman serta pengawasan terhadap sistem manajemen keamanan informasi dan persandian daerah.
- Pemberian Reward kepada ASN dan Non ASN yang berprestasi dan berkontribusi dalam peningkatan capaian kinerja OPD.

L A M P I R A N

Data dukung SAKIP Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kabupaten Bone Tahun 2023 terdiri dari:

- I. Renstra Perubahan 2018-2023 (pemutakhiran Kepmendagri 080-5889 Tahun 2021);
2. Renja Tahun 2024;
3. Indiaktor Kinerja Utama (IKU);
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2024;
5. Rencana Aksi Tahun 2024;
6. LKjIP Tahu 2023;
7. Data Dukung Capaian Kinerja;
8. Cascading Kinerja;
9. Pohon Kinerja;
10. Evaluasi Triwulanan dan Tahunan;
- II. Tindak Lanjut LHE SAKIP Tahun 2022;
12. Pengukuran Kinerja Rencana Aksi Tahun 2023;
13. Data Dukung Lain

Dokumen Digital | DATA DUKUNG SAKIP | 2023



